



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Sutan Syahrir No.238 Telp. (0752) 84506 Padang Panjang 27118

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DAVIDSON, S.Sos., M.M.

Jabatan : Plt. INSPEKTUR KOTA PADANG PANJANG
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HENDRI ARNIS

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
WALI KOTA

HENDRI ARNIS

Padang Panjang, 1 Oktober 2025
PIHAK PERTAMA
Plt. INSPEKTUR

DAVIDSON, S.Sos., M.M.
NIP. 19730116 200212 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
INSPEKTUR KOTA PADANG PANJANG**

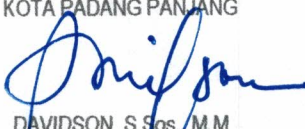
SEBELUM				SESUDAH			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(5)
1	Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Level Maturitas SPIP	Level 3	1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level 3
2	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder	Persentase OPD yang menyatakan puas atas Pelayanan Inspektorat	97%				
3	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3	2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	72

No	Program	Anggaran	
		Sebelum	Sesudah
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	672.172.000	463.218.000
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	372.298.200	52.594.400
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.173.076.299	5.339.075.667

WALI KOTA PADANG PANJANG

HENDRI ARNIS

Padang Panjang, 01 Oktober 2025
PIL INSPEKTUR
KOTA PADANG PANJANG


DAVIDSON, S.Sos. M.M
NIP. 19730116 200712 1 005



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Sutan Syahrir No.238 Telp. (0752) 84506 Padang Panjang 27118

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DAVIDSON, S.Sos., M.M.

Jabatan : SEKRETARIS INPEKTORAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DAVIDSON, S.Sos., M.M

Jabatan : Plt. INSPEKTUR KOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
Plt. INSPEKTUR



DAVIDSON, S.Sos., M.M
NIP. 19730116 200212 1 005

Padang Panjang, 1 Oktober 2025
PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS



DAVIDSON, S.Sos., M.M
NIP. 19730116 200212 1 005

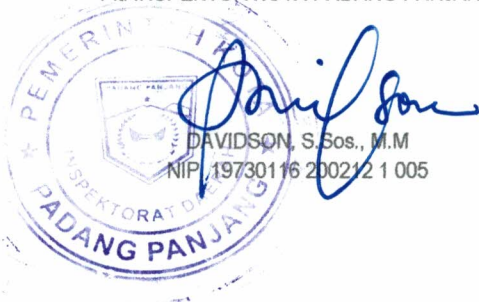
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

No.	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang tuntas dilaksanakan	Persentase Kegiatan Penunjang yang Tuntas dilaksanakan	93%	100%
	1) Meningkatkan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan yang dibayarkan Tepat Waktu	100%	100%
	(1) Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/ Bulan	31 Orang/ Bulan
	2) Meningkatkan Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai	100%	100%
	(2) Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 orang	31 orang
	3) Meningkatkan Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah yang selesai dilaksanakan	Persentase Pengadministrasi Umum yang selesai dilaksanakan	100%	100%
	(1) Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	4 Paket
	(2) Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
	(3) Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 Paket	4 Paket
	(4) Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	12 Paket
	(5) Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	150 Laporan
	4) Meningkatkan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD yang selesai diadakan	100%	100%
	(1) Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit
	5) Meningkatkan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang selesai dilaksanakan	90%	90%
	(1) Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan
	(2) Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48 Laporan	48 Laporan
	(3) Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan
	5) Meningkatkan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD yang selesai dilaksanakan	100%	100%
	(1) Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit

	(2) Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit
	(3) Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20 Unit	20 Unit
	(4) Tersedianya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	1 Unit

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		Keterangan
		Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.173.076.199	5.339.075.667	
	1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.748.304.519	4.826.175.457	
	(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.748.304.519	4.826.175.457	
	2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200.000.000	27.250.000	
	(2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	200.000.000	27.250.000	
	3) Administrasi Umum Perangkat Daerah	315.717.480	127.727.010	
	(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1.201.000	597.000	
	(2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.958.800	979.400	
	(3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.696.280	24.339.310	
	(4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.723.400	6.908.300	
	(5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	246.138.000	94.903.000	
	4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	168.444.600	92.747.000	
	(1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	168.444.600	92.747.000	
	5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	219.023.600	193.235.200	
	(1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.040.000	520.000	
	(2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.808.400	12.340.000	
	(3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.175.200	180.375.200	
	6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	521.586.000	71.941.000	
	(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	184.406.000	52.906.000	
	(2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.100.000	15.300.000	
	(3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.790.000	3.735.000	
	(4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	297.290.000	-	

PI. INSPEKTUR KOTA PADANG PANJANG



DAVIDSON, S.Sos., M.M
NIP. 19730116 200212 1 005

Padang Panjang, 01 Oktober 2025

SEKRETARIS

INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

DAVIDSON, S.Sos., M.M
NIP. 19730116 200212 1 005



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Sutan Syahrir No.238 Telp. (0752) 84506 Padang Panjang 27118

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

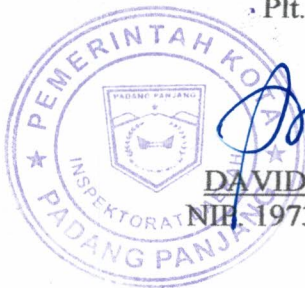
Nama : YONHENDRIL, S.E.Akt., M.Si.
Jabatan : Plt. INSPEKTUR PEMBANTU I INPEKTORAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DAVIDSON, S.Sos., M.M
Jabatan : Plt. INSPEKTUR KOTA PADANG PANJANG
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
Plt. INSPEKTUR



DAVIDSON, S.Sos., M.M
NIP. 19730116 200212 1 005

Padang Panjang, 1 Oktober 2025
PIHAK PERTAMA
Plt. INSPEKTUR PEMBANTU I


YONHENDRIL, S.E.Akt., M.Si
NIP. 19740614 199903 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
INSPEKTUR PEMBANTU I KOTA PADANG PANJANG**

SEBELUM				SESUDAH			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(5)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Kegiatan Pengawasan yang tuntas dilaksanakan	90%	1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran n 1	85%
	1) Meningkatkan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh Auditan	75%	1)	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh Auditan	75%
	1) Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6 Laporan	1)	Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6 Laporan
	2) Tersedianya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	2)	Tersedianya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan
2	Meningkatnya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Capaian Aksi pada Aplikasi MCP	92%	2	Meningkatnya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1. Maturitas SPIP 2. Kapabilitas APIP	Level 3
	1) Meningkatkan Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang Tuntas dilaksanakan	88%	1)	Meningkatnya Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang Tuntas dilaksanakan	100%
	1) Terselenggaranya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	23 Perangkat Daerah	1)	Terselenggaranya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	23 Perangkat Daerah

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	87.300.000	48.150.000	
	1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal	87.300.000	48.150.000	
	1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	65.100.000	29.925.000	
	2) Reviu Laporan Kinerja	22.200.000	18.225.000	
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	106.725.000	30.970.000	
	1) Pendampingan dan Asistensi	106.725.000	30.970.000	
	1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	106.725.000	30.970.000	

Pt. INSPEKTUR KOTA PADANG PANJANG



Padang Panjang, 01 Oktober 2025
Pt. INSPEKTUR PEMBANTU I
INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

YONDHENDRI, S.E., Akt., M.Si
NIP. 19740614 199903 1 005



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Sutan Syahrir No.238 Telp. (0752) 84506 Padang Panjang 27118

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

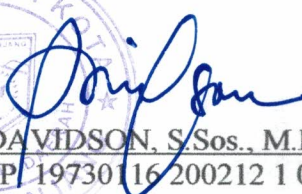
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YONHENDRIL, S.E.AKt., M.Si.
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU II INPEKTORAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama : DAVIDSON, S.Sos., M.M
Jabatan : Plt. INSPEKTUR KOTA PADANG PANJANG
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

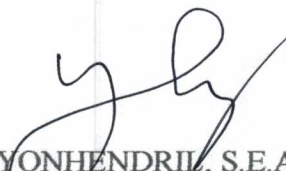
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
Plt. INSPEKTUR


DAVIDSON, S.Sos., M.M
NIP. 19730116 200212 1 005

Padang Panjang, 1 Oktober 2025
PIHAK PERTAMA
INSPEKTUR PEMBANTU II


YONHENDRIL, S.E.AKt., M.Si
NIP. 19740614 199903 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
INSPEKTUR PEMBANTU II KOTA PADANG PANJANG**

SEBELUM				SESUDAH			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(5)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Kegiatan Pengawasan yang tuntas dilaksanakan	90%	1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran n 1	85%
	1) Meningkatkan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh Auditan	75%		1) Meningkatkan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh Auditan	75%
	1) Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	125 Laporan		1) Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	125 Laporan
	2) Tersedianya Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan		2) Tersedianya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	423.450.000	360.830.000	
	1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal	423.450.000	360.830.000	
	1) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	406.800.000	345.870.000	
	2) Reviu Laporan Keuangan	16.650.000	14.960.000	

Plt. INSPEKTUR KOTA PADANG PANJANG



Padang Panjang, 01 Oktober 2025

INSPEKTUR PEMBANTU II
INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

YONDHENDRIL, S.E., Akt., M.Si
NIP. 19740614 199903 1 005



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Sutan Syahrir No.238 Telp. (0752) 84506 Padang Panjang 27118

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FIRSON SYUKRIADI, S.T., M.Si.

Jabatan : Plt. INSPEKTUR PEMBANTU III INSPEKTORAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DAVIDSON, S.Sos., M.M

Jabatan : Plt. INSPEKTUR KOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
Plt. INSPEKTUR



DAVIDSON, S.Sos., M.M
NIP. 19730116 200212 1 005

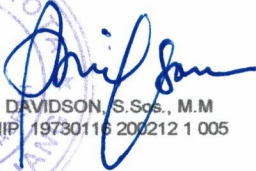
Padang Panjang, 1 Oktober 2025
PIHAK PERTAMA
Plt. INSPEKTUR PEMBANTU III

FIRSON SYUKRIADI, S.T., M.Si.
NIP. 19860313 201001 1 009

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
INSPEKTUR PEMBANTU III KOTA PADANG PANJANG**

SEBELUM				SESUDAH			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(5)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Kegiatan Pengawasan yang tuntas dilaksanakan	90%	1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran n 1	85%
	1) Meningkatkan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh Auditan	75%		1) Meningkatkan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh Auditan	75%
	1) Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5 Dokumen		1) Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5 Dokumen
	2) Meningkatkan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang tuntas dilaksanakan	100%		2) Meningkatkan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang tuntas dilaksanakan	100%
	1) Tersedianya Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang ditangani	1 Laporan		Tersedianya Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang ditangani	1 Laporan
	2) Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	6 Laporan		Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	6 Laporan
2	Meningkatnya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Capaian Aksi pada Aplikasi MCP	92%	2	Meningkatnya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1. Maturitas SPIP 2. Kapabilitas APIP	Level 3
	1) Meningkatkan Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang Tuntas dilakukan	88%		1) Meningkatkan Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang Tuntas dilakukan	100%
	1) Terselenggaranya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	23 Perangkat Daerah		1) Terselenggaranya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	23 Perangkat Daerah
	2) Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan		2) Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	161.422.000	54.238.000	
	1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal	75.172.000	30.508.000	
	1) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	75.172.000	30.508.000	
	2) Penyelenggaraan Pengawasan Tujuan Tertentu	86.250.000	23.730.000	
	1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	22.050.000	-	
	2) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	64.200.000	23.730.000	
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	265.573.200	21.624.400	
	1) Pendampingan dan Asistensi	265.573.200	21.624.400	
	1) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	19.000.000	5.220.000	
	2) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	122.148.800	16.404.400	
	3) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	124.424.400	-	


 PIt. INSPEKTUR KOTA PADANG PANJANG

 DAVIDSON, S.Sc., M.M
 NIP. 19730116 200212 1 005

Padang Panjang, 01 Oktober 2025
 PIt. INSPEKTUR PEMBANTU III
 INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

 FIRSON SYUKRIADI, ST, M.Si
 NIP. 19860313 201001 1 009



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Sutan Syahrir No.238 Telp. (0752) 84506 Padang Panjang 27118

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEWI HERIYANTI IRMAN, S.E
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN
KEPEGAWAIAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG
PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

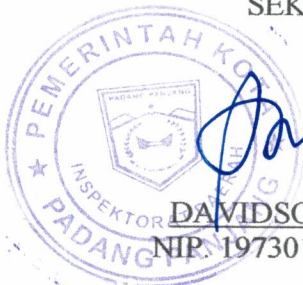
Nama : DAVIDSON, S.Sos., M.M
Jabatan : SEKRETARIS INPEKTORAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

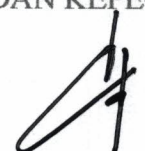
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS



DAVIDSON, S.Sos., M.M
NIP. 19730116 200212 1 005

Padang Panjang, 1 Oktober 2025
PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN,
UMUM DAN KEPEGAWAIAN



DEWI HERIYANTI IRMAN, S.E
NIP. 19871008 200902 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN KEPEGAWAIAN
INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

No.	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang tuntas dilaksanakan	Persentase Kegiatan Penunjang yang Tuntas dilaksanakan	93%	100%
	1) Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan yang dibayarkan Tepat Waktu	100%	100%
	(1) Terkoordinirnya penyiapan daftar pembayaran gaji ASN dan THL	Jumlah dokumen pembayaran gaji ASN dan THL	12 Dokumen	12 Dokumen
	(2) Terlaksananya pencatatan Laporan Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Laporan Realisasi Anggaran	12 Dokumen	12 Dokumen
	(3) Terlaksananya pengawasan pencatatan pengeluaran yang dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran	Jumlah dokumen verifikasi pengesahan belanja yang dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran	12 Dokumen	12 Dokumen
	2) Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang selesai dilaksanakan	100%	100%
	(1) Terlaksananya proses administrasi surat masuk dan surat keluar dengan baik	Jumlah dokumen surat masuk dan surat keluar yang diproses	250 Dokumen	250 Dokumen
	(2) Terciptanya arsip yang dikelola dengan baik	Jumlah arsip yang dikelola	12 Dokumen	12 Dokumen
	(3) Terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana kantor dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dikelola	3 Jenis	3 Jenis

SEKRETARIS
INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG


DAVIDSON, S.Sos., M.M
NIP. 19730116 200212 1 005

Padang Panjang, 01 Oktober 2025
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN KEPEGAWAIAN
INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG


DEWI HERIYANTI IRMAN, S.E
NIP. 19871008 200902 2 001